

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi atas seluruh hasil studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja daerah untuk pendidikan dasar dan menengah di Kota Bekasi.

Uraian pada bab ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan tentang jawaban dari permasalahan penelitian, pencapaian tujuan penelitian dan saran ataupun rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan hasil analisis permasalahan.

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alokasi belanja pendidikan di Kota Bekasi setelah desentralisasi fiskal tidak menunjukkan perubahan yang berarti dari segi persentasenya dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal. Bahkan sesudah desentralisasi, persentase alokasi belanja pendidikan dari total APBD justru sedikit menurun, yang semula 31% (pra desentralisasi) menjadi 29% (pasca desentralisasi). Namun secara umum, Pemkot Bekasi sudah menunjukkan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBD-nya (sesuai amanat UUD 1945). Bahkan hal tersebut sudah dilakukan sejak sebelum periode desentralisasi fiskal. Perubahan kebijakan positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah dengan mengubah prioritas belanja, dengan secara bertahap meningkatkan persentase alokasi belanja pembangunan pendidikan. Belanja pembangunan sektor pendidikan sesudah desentralisasi fiskal meningkat menjadi rata-rata sebesar 32,03% dari sebelum desentralisasi fiskal yang hanya 9,01% dari total belanja pendidikan. Belanja pembangunan pendidikan atau belanja langsung pendidikan merupakan belanja operasional pendidikan yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan kegiatan teknis kependidikan, sehingga dengan peningkatan belanja pembangunan pendidikan akan mendukung terwujudnya peningkatan layanan pendidikan di Kota Bekasi

2. Dalam pengalokasian belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah, Pemkot Bekasi telah membuktikan komitmennya untuk meningkatkan layanan dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang terus naik secara nominal tiap tahunnya. Alokasi anggaran belanja pembangunan pendidikan dasar secara persentase justru menurun pada periode desentralisasi fiskal jika dibandingkan dengan sebelum desentralisasi fiskal (dari rata-rata sebesar 98% per tahun menjadi rata-rata 80% per tahun). Sedangkan alokasi anggaran belanja pembangunan pendidikan menengah semakin meningkat dari rata-rata 1% per tahun pada periode sebelum desentralisasi menjadi rata-rata 12% per tahun setelah desentralisasi. Perubahan kebijakan ini tentunya terkait pula dengan penyerahan kewenangan di bidang pendidikan. Sebelum tahun 2001, kewenangan pemda kabupaten/kota dalam bidang pendidikan hanya terbatas pada penyelenggaraan di tingkat pendidikan dasar saja. Namun sejak dilaksanakannya desentralisasi pendidikan tahun 2001 yang merupakan bagian dari bentuk penyerahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah diserahkan pula kepada pemda kabupaten/kota.
3. Pada periode setelah desentralisasi fiskal, prioritas anggaran belanja pembangunan pendidikan di Kota Bekasi pada enam tahun pertama desentralisasi fiskal (TA.2001 s.d. TA.2006) adalah pada belanja modal untuk pemenuhan atau perbaikan fasilitas sarana dan prasarana fisik pendidikan. Sedangkan pada periode tiga tahun terakhir ini (TA.2007 s.d. TA.2009) Pemerintah Kota Bekasi melakukan perubahan kebijakan dengan memberikan perhatian lebih pada program-program pemerataan pendidikan dan peningkatan layanan pendidikan. Perubahan kebijakan tersebut menyebabkan pergeseran alokasi belanja pembangunan pendidikan, yang semula terbesar pada belanja modal kemudian bergeser pada peningkatan belanja barang.
4. Peran Pemerintah Pusat melalui Dana Dekonsentrasi masih cukup besar, yaitu sebesar 40% dalam pengalokasian belanja pendidikan di Kota Bekasi. Masih besarnya peran Pemerintah Pusat di satu sisi telah membantu proses perwujudan peningkatan pemerataan dan pelayanan pendidikan di Kota

Bekasi, di sisi lain justru menyebabkan kecanggungan dan ketidakmandirian Pemkot Bekasi dalam menetapkan kebijakan belanjanya.

5. Pengaruh keterlibatan para stakeholder dalam kebijakan penganggaran pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. Peran DPRD Kota Bekasi dalam proses pengambilan kebijakan belanja lebih kepada penentuan hasil akhir dari penetapan kegiatan dan anggaran pendidikan. Sedangkan pada saat pembahasan/perencanaan mengenai mekanisme atau bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, mereka tidak mau terlibat lebih jauh dan cenderung menyerahkan saja kepada pihak eksekutif. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Bekasi terhadap kinerja eksekutif belum didukung oleh kemampuan dan pengetahuan teknis yang memadai dari anggota dewan. Oleh karena itu, dalam berbagai hal anggota dewan masih bersikap reaktif, namun belum banyak memperlihatkan inisiatif.
 - b. Aspirasi masyarakat Kota Bekasi dalam proses pengambilan kebijakan belanja masih sebatas pada tahap perencanaan saja, karena Pemkot Bekasi belum banyak memberikan keleluasaan bagi masyarakatnya untuk terlibat dalam proses penetapan anggaran. Aspirasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang diusulkan melalui komite sekolah kurang mendapat perhatian dari pemerintah, kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis dan enggan untuk turut berperan serta dalam pembangunan pendidikan. Hal lain yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk turut berperan serta dalam penetapan kebijakan pendidikan adalah karena persepsi mereka bahwa pembangunan pendidikan adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah.
 - c. Sikap/komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan masyarakat Bekasi yang cerdas sudah diimplementasikan dalam bentuk kebijakan alokasi belanja daerah untuk pendidikan. Perubahan kebijakan belanja berupa peningkatan alokasi belanja pembangunan pendidikan menunjukkan semakin besarnya perhatian Pemkot Bekasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan, meskipun pada pelaksanaannya masih

banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan tingkat kebutuhan riil dari kegiatan pendidikan itu sendiri.

6. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan ternyata tidak sepenuhnya memberikan implikasi langsung terhadap perluasan kesempatan masyarakat Kota Bekasi untuk memperoleh pelayanan pendidikan
 - Di tingkat pendidikan dasar, pengaruh alokasi anggaran pendidikan dari belanja daerah cukup besar dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Hal ini karena tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta adanya pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya pendidikan untuk siswa di tingkat pendidikan dasar, yang bersumber dari belanja daerah.
 - Sedangkan di tingkat pendidikan menengah, alokasi anggaran pendidikan dari belanja daerah belum memberikan pengaruh yang besar bagi perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan setingkat SMA. Hal ini disamping karena masih sedikitnya jumlah sekolah negeri dan sarana prasarana pendukungnya, juga dikarenakan belum dilaksanakannya kebijakan pembebasan biaya sekolah atau subsidi untuk siswa di tingkat sekolah menengah oleh Pemkot Bekasi.

5.2 Rekomendasi

Berpijak pada hasil studi analisis ini, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bekasi di tahun-tahun mendatang dituntut untuk lebih meningkatkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya, melalui pengalokasian anggaran pembangunan pendidikan yang lebih besar lagi. Distribusi anggaran pembangunan pendidikan kiranya tidak hanya difokuskan pada usaha untuk memenuhi misi pendidikan gratis saja, namun agar tetap memberikan prioritas yang besar pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai. Perlu dilakukan peningkatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, serta perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah SMP dan SMA negeri dengan melihat tingkat kebutuhan pada masing-masing wilayah

Universitas Indonesia

kecamatan dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kota Bekasi.

2. Pemerintah Kota Bekasi kiranya perlu menggalang partisipasi pembiayaan pendidikan secara kreatif dari masyarakat luas, terutama dari para pengusaha di bidang pendidikan agar lebih besar mengalokasikan dana pendidikan tanpa membebani biaya yang terlalu tinggi bagi masyarakat orangtua siswa atau golongan lemah/miskin.
3. Kinerja DPRD Kota Bekasi yang selama ini dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, sehingga perlu adanya mekanisme dimana DPRD harus bertanggung jawab kepada masyarakat, serta dibentuk lembaga penelitian dan layanan informasi yang independen guna membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya di bidang penyusunan kebijakan dan pengawasan.
4. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban belanja pendidikan, perlu kiranya disediakan media informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memberikan penilaian yang obyektif tentang dampak atau pencapaian upaya dari setiap alokasi anggaran yang disediakan.